

**STRATEGI MGMP SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA DALAM MENINGKATKAN
KOMPETENSI PROFESIONAL GURU DI TENGAH
BERBAGAI KENDALA**

**(Studi Kasus di Kabupaten Limapuluh Kota Provinsi
Sumatera Barat)**

*THE FIRST MIDDLE SCHOOL MGMP STRATEGY
TO IMPROVE TEACHER PROFESSIONALISM
COMPETENCY IN VARIOUS CONSTRAINTS
(Case Study in Kabupaten Limapuluh Kota, West Sumatera
Province)*

Bambang Suwardi Joko

Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan, Balitbang dan
Perbukuan, Kemendikbud
bambang_tito@yahoo.com

DOI : 10.24832/jpkp.v13i2.375

ABSTRACT

This study aims to determine the MGMP efforts of subjects in maximizing teacher professionalism amid in constraints and limitations, knowing the funding profile and the activeness of the MGMP and knowing the solutions made by the MGMP in overcoming obstacles amidst limitations. This research is a case study of the MGMP in junior high school subjects in the district. Fifty Cities using a descriptive qualitative approach. Data collection was carried out through questionnaire distribution techniques, field observations, structured interviews, documentation studies, and conducting clustered group discussions (FGD). The analysis is more descriptive, both in presenting statistical tables of field findings and in qualitative in-depth analysis. The research found that most of the junior high school MGMP subjects studied were quite active in conducting meetings, at least 12 times a year, the average activity of the members was above 70 percent. The management has always maintained that the MGMP must continue to run with independent funds, through the principle of togetherness and the principle of "from, by and for the teacher". The members of the Junior High School Subject MGMP immediately seek and coordinate in deciding and resolving problems related to funds, materials and the availability of required resource persons (sources). For the MGMP to continue to exist, it is necessary to monitor and evaluate MGMP activities in the future. The results of monitoring and evaluation can be used as a follow-up to activities, so that they can play a more role as expected in professional improvement and teacher development in a sustainably manner by the demands of knowledge and technology developments.

Keywords: Strategy, MGMP, teachers, professionals, constraints.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengetahui upaya MGMP mata pelajaran dalam memaksimalkan profesionalisme guru di tengah kendala dan keterbatasan, mengetahui profil pendanaan dan keaktifan MGMP serta mengetahui solusi yang dilakukan MGMP dalam mengatasi kendala di tengah keterbatasan. Penelitian ini merupakan studi kasus MGMP mata pelajaran SMP di Kab. Limapuluh Kota dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik pembagian kuesioner, observasi lapangan, wawancara terstruktur, studi dokumentasi, dan melakukan Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT). Analisis lebih bersifat deskriptif, baik dalam menampilkan tabel statistik temuan lapangan maupun pendalaman kualitatif. Penelitian menemukan bahwa sebagian besar MGMP mapel SMP yang dikaji cukup aktif melakukan pertemuan, minimal sebanyak 12 kali dalam satu tahun, keaktifan anggota rata-rata di atas 70 persen. Pengurus selalu berpendirian MGMP harus tetap berjalan dengan dana mandiri, melalui prinsip kebersamaan dan asas "dari, oleh, dan

untuk guru". Anggota MGMP mapel SMP serta merta mengupayakan dan berkoordinasi dalam memutuskan dan menyelesaikan permasalahan terkait dana, materi serta keberadaan (sumber) narasumber yang dibutuhkan. Agar MGMP tetap eksis, perlu pemantauan dan evaluasi kegiatan MGMP di masa mendatang. Hasil pemantauan dan evaluasi dapat digunakan sebagai tindak lanjut kegiatan, agar lebih berperan sebagaimana diharapkan dalam peningkatan profesional dan pengembangan guru secara berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perkembangan pengetahuan dan teknologi.

Kata kunci: Strategi, MGMP, guru, profesional, kendala.

PENDAHULUAN

Tantangan yang dihadapi organisasi MGMP adalah kemampuan membentuk komunitas guru yang kompeten dan profesional dalam melaksanakan tugas utama pembelajaran. Kompetensi dan profesional guru itu sendiri merupakan amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. Kompetensi guru merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai, dan diaktualisasikan oleh guru dalam melaksanakan tugasnya, sedangkan profesional bermakna sebagai pemilikan keahlian guru dalam pekerjaan yang sesuai dengan kompetensinya tersebut (Permendiknas No. 16/2017).

Namun realita berbicara lain, keberadaan organisasi MGMP yang ditujukan untuk guru SMP dan SMA masih jauh dari harapan. Meski organisasi ini telah dibentuk relatif lama belum cukup mampu melaksanakan peran dan fungsinya sebagaimana diharapkan, yakni sebagai tempat melakukan pertukaran pengalaman, penulisan/pengimbasan pengetahuan tentang segenap aspek terkait pembelajaran, kegiatan diskusi, serta pemecahan masalah yang terkait dengan pembelajaran. Organisasi yang dibentuk melalui prinsip dari, oleh, dan untuk guru ini belum cukup mampu menjadi pintu masuk bagi peningkatan kompetensi dan profesionalisme guru yang pada akhirnya diharapkan berdampak positif terhadap mutu pendidikan, baik dalam lingkup sekolah, daerah, provinsi, maupun nasional.

Sebenarnya berbagai cara telah dilakukan untuk meningkatkan peran dan fungsi MGMP ini, antara lain: memberikan pelatihan terhadap pengelola, membantu dana kegiatan, bahkan digunakan sebagai wadah dalam memberikan wadah pelatihan program Guru Pembelajar oleh pihak Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK). Tahun 2016 salah satunya, Ditjen GTK melaksanakan pelatihan program Guru

Pembelajar (GP) dengan memanfaatkan fungsi MGMP ini. Tujuannya adalah meningkatkan kompetensi dan profesionalitas kerja guru dengan menggunakan pendekatan moda tatap muka, moda dalam jaringan (*on-line*), dan moda kombinasi keduanya. Tahun 2018-2019, program ini berganti nama menjadi Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) dengan menambah jumlah peserta pelatihan. Namun meski sebanyak ratusan ribu orang guru telah menerima pelatihan tersebut, peningkatan kualitas pendidikan belum memperlihatkan indikasi yang memuaskan.

Agung (2017) dalam paparan ilmiahnya menyatakan lemahnya kepemilikan kompetensi guru, membawa pencapaian hasil belajar anak didik yang kurang memadai sehingga mendesak dilakukan peningkatan kompetensi guru. Pembentukan guru yang kompeten dan profesional memerlukan dua strategi pendekatan, yaitu: (1) melakukan pengembangan kompetensi guru; dan (2) meningkatkan profesionalitas kerja, baik dari sisi internal guru maupun faktor eksternal lainnya, Islahuddin (2018) berpendapat ada dua model pengembangan guru yaitu pengembangan secara formal dan informal. Secara informal, guru atas keinginan sendiri melatih dan mengembangkan dirinya dengan mempelajari buku-buku literatur yang ada hubungannya dengan pekerjaannya. Artinya guru memiliki inisiatif berkeinginan keras untuk maju dengan cara meningkatkan kinerjanya. Sedangkan pengembangan secara formal adalah guru ditugaskan lembaga pendidikan untuk mengikuti pendidikan atau pelatihan baik yang dilakukan oleh organisasi maupun yang dilaksanakan oleh lembaga pendidikan atau lembaga pelatihan.

Selayaknya MGMP dapat menjadi tempat kolaboratif guru untuk mendukung tugas pembelajaran. Hal itu baru terwujud apabila MGMP telah berdaya dan berfungsi ganda, yakni sebagai wahana untuk membentuk kemampuan

mengelola pembelajaran guru, sekaligus pengembangan keprofesian secara berkelanjutan. Namun hasil itu baru akan terealisasi jika MGMP benar-benar mampu menunjukkan aktivitas dan kreativitas kegiatannya, serta mampu melibatkan partisipasi guru anggotanya. Wadah MGMP harus dirasakan manfaatnya oleh guru anggotanya, bukan hanya sebatas tempat berkumpul dan 'kongkow-kongkow' semata. MGMP yang tidak berdaya cenderung belum akan menjadi sumber di mana guru dapat menimba ilmu dan mengembangkan kemampuan profesionalitas diri. Keikutsertaan guru terhadap MGMP yang belum berdaya lebih didasarkan atas keterpaksaan, dorongan *atasan*, atau sekedar mengikuti yang dianggap kurang memberikan pemenuhan kebutuhan menunjang pembelajaran (Agung, 2017; Winingsih dkk, 2019).

Tegasnya memberdayakan MGMP masih perlu terus diupayakan. Sebagai wadah pertemuan para guru mata pelajaran (mapel), MGMP tidak hanya berfungsi sebagai forum silaturahmi, namun untuk menampung berbagai permasalahan yang dihadapi guru di sekolah sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang diembannya (Nurdianti, 2013). MGMP juga harus bermanfaat untuk menambah wawasan, ilmu, wadah diskusi tentang kesulitan dalam mengimplementasikan kurikulum yang berlaku. Dengan kata lain kehadiran MGMP haruslah dirasakan peran dan manfaatnya dalam mengatasi segenap aspek yang terkait dengan tugas pokok pembelajaran yang dihadapi guru. Apabila MGMP dirasakan kurang efektif, monoton, membosankan, miskin kreatif, dan sebagainya menjadikan guru malas hadir dan berpartisipasi, sehingga MGMP akan kurang berkembang dan tidak akan membawa hasil yang diharapkan. Ketidak efektifan MGMP itu sendiri dipastikan dipengaruhi oleh kompleksitas faktor, antara lain manajemen yang kurang lancar, tidak adanya dana, akses, dan dari sisi guru yang disibukkan dengan jam mengajar yang padat (Sumardi, 2012; Republika, 2018, Winingsih dkk, 2019).

Sudarnoto (2012) mengemukakan perlu ada upaya untuk merevitalisasi organisasi guru MGMP agar dapat berperan secara optimal. Tidak disangkal bahwa terdapat juga sejumlah MGMP yang telah berjalan memuaskan dan mampu menjadi *entry point* bagi peningkatan kompetensi dan profesionalitas guru-gurunya. Upaya merevitalisasi MGMP pun perlu belajar dari organisasi-organisasi guru seperti ini,

mengambil hal-hal baik yang telah dilaksanakan dan digunakan sebagai refleksi bagi yang lain untuk meningkatkan peran dan fungsinya. Salah satu kasus MGMP terkategori baik ini berada di wilayah Kabupaten Limapuluh Kota, Sumatera Barat. MGMP-MGMP di wilayah ini bukan hanya mampu memperlihatkan keaktifan kegiatan, melibatkan partisipasi guru, dan berperan sebagai wahana peningkatan kompetensi dan profesionalitas guru.

Artikel ini terkait dengan yang dikatakan terakhir, yakni ingin mengetahui segenap hal terkait dengan pengelolaan MGMP di wilayah Kabupaten Limapuluh Koto, Sumatera Barat. Paper bertujuan memotret profil dan kegiatan MGMP mapel SMP di Kab. Limapuluh Kota, serta kendala yang dihadapi, solusi yang dilakukan, serta upaya yang dilaksanakan dalam mengatasi permasalahan yang terjadi. Hasil kajian diharapkan dapat memberikan masukan terhadap MGMP lain, dan memberikan manfaat bagi pemerintah pusat dan daerah guna menentukan kebijakan bagi pemberdayaan MGMP dalam meningkatkan profesionalisme guru. Praktik baik yang dilakukan MGMP SMP Kab. Limapuluh Kota diharap dapat menjadi rujukan bagi MGMP daerah lain untuk meningkatkan peran dan fungsinya secara optimal.

Tantangan Globalisasi (Pengembangan Kualitas dan Daya Saing SDM)

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) saat ini telah membuat perubahan besar serta melahirkan berbagai macam teknologi baru di dunia. Teknologi telah menjadi alat yang dianggap mampu membantu sebagian besar kebutuhan manusia. Peran penting teknologi inilah yang membawa peradaban manusia memasuki era digital. Era digital terlahir dengan kemunculan digital, jaringan internet khususnya teknologi informasi komputer. Berbagai kalangan telah dimudahkan dalam mengakses suatu informasi melalui banyak cara, serta dapat menikmati fasilitas dari teknologi digital dengan bebas dan terkendali.

Kemajuan TIK dan era digital teknologi yang semakin canggih menyebabkan terjadinya perubahan besar dunia, menyebabkan semua begara bersaing memanfaatkan teknologi itu sendiri pada berbagai sektor kehidupan. Hampir satu dasawarsa Indonesia terlambat dalam

mengadopsi teknologi komunikasi khususnya internet. Namun budaya digital masyarakat Indonesia sangat cepat menerima perkembangan teknologi. Di lihat secara global Indonesia masuk dalam budaya digital yang di butuhkan dalam mencapai pertumbuhan yang positif sesuai dengan kemajuan jaman itu sendiri (Setiawan, 2017).

Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat di era globalisasi saat ini tidak bisa dihindari terhadap dunia pendidikan. Tuntutan global menuntut dunia pendidikan untuk menyesuaikan perkembangan teknologi terhadap usaha dalam peningkatan mutu pendidikan, terutama penyesuaian penggunaan TIK khususnya dalam proses pembelajaran. Pendidikan harus menjadi media utama untuk memahami, menguasai, dan memperlakukan teknologi dengan baik dan benar.

Permasalahan yang muncul seiring dengan pemanfaatan TIK dalam dunia pendidikan adalah faktor penguasaan TIK oleh para guru. Sebagaimana kita ketahui, dalam pendidikan di sekolah guru adalah motor utama penggerak dalam pelaksanaan pembelajaran (Budiana, dkk..

Upaya yang harus dilakukan pada teknologi informasi dan digital harus disikapi dengan serius, menguasai, dan mengendalikan peran teknologi dengan baik agar era digital membawa manfaat bagi kehidupan. Menurut H. Hamzah B. Uno dan Hj. Nina Lamatenggo, (2011, 61) dalam Budiman (2017), bahwa kecendrungan pendidikan di Indonesia di masa mendatang adalah:

1. Berkembangnya pendidikan terbuka dengan modus belajar jarak jauh (*distance learning*).
2. *Shareng resource* bersama antar lembaga pendidikan/latihan dalam sebuah jaringan perpustakaan dan instrumen pendidikan lainnya (guru, laboratorium) berubah fungsi menjadi sumber informasi daripada sekedar rak buku;
3. Penggunaan perangkat teknologi informasi interaktif, seperti CD-ROM multimedia dalam pendidikan secara bertahap menggantikan televisi dan video.

Perubahan akan tuntutan itulah yang menjadikan dunia pendidikan memerlukan inovasi dan kreativitas dalam proses pembelajarannya karena banyak orang mengusulkan dalam pendidikan khususnya pembelajaran, namun sedikit sekali orang berbicara solusi pemecahan masalah

proses belajar dan mengajar yang sesuai dengan tuntutan global Abad ke 21 saat ini.

Menurut Rosenberg dalam G. Gunawan (2009) dalam Sudibyo (2011), dengan berkembangnya penggunaan TIK terdapat lima pergeseran dalam proses pembelajaran, yaitu: 1) dari pelatihan ke penampilan, 2) dari ruang kelas ke di mana dan kapan saja, 3) dari kertas ke "*on line*" atau saluran, 4) dari fasilitas fisik ke fasilitas jaringan kerja, 5) dari waktu siklus ke waktu nyata.

Dampak positif dalam dunia pendidikan informasi yang dibutuhkan akan semakin cepat dan mudah di akses, inovasi dalam pembelajaran semakin berkembang dengan adanya inovasi *e-learning*, kemajuan TIK memungkinkan berkembangnya kelas virtual atau kelas yang berbasis *teleconference* yang tidak mengharuskan guru dan siswa berada dalam satu kelas. Sejatinya perkembangan kemajuan TIK harus diimbangi dengan peningkatan dan kemampuan SDM terutama kualitas guru dalam menghadapi daya saing yang sudah pada tingkatan global.

Selain itu, melalui internet layanan informasi dapat diberikan sebagai sumber belajar, media belajar yang dapat dipelajari sesuai dengan kecepatan belajar peserta didik. Media belajar tidak terbatas pada huruf dan gambar melainkan dapat dikombinasikan dengan grafik, animasi, video, audio secara bersama-sama sehingga media ini lebih dikenal dengan istilah multimedia. Pengaruh positif pemanfaatan internet untuk pendidikan dalam membangun SDM dunia pendidikan harus mampu mengikuti perkembangan aplikasi IPTEK (Husaini, 2014).

Oleh karena itu, guru harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi terkini karena sudah merupakan keharusan yang wajib di gunakan dalam media pembelajaran. Demikian halnya dengan literasi dalam pembelajaran, literasi juga mencakup kemampuan untuk mengenali dan memahami ide-ide yang disampaikan secara visual dalam bentuk video dan gambar. GLN (Gerakan Literasi Nasional) Kemendikbud menetapkan 6 literasi dasar salah satunya literasi digital. Perkembangan TIK yang pesat saat ini dibutuhkan pengetahuan literasi digital dalam pembelajaran daring. Literasi digital sendiri merupakan kemampuan individu menggunakan teknologi digital dan alat komunikasi untuk mengakses, mengelola, mengintegrasikan, menganalisis dan mengevaluasi informasi. Contoh pengetahuan literasi digital yaitu kemampuan menghubungkan

perangkat jaringan internet yang memadai, serta menginstal berbagai perangkat lunak untuk pembelajaran daring.

Dunia pendidikan ke depan, tuntutan guru yang profesional memegang peranan penting sesuai perkembangan TIK yang mengarah digitalisasi pembelajaran menuju Merdeka belajar. Merdeka belajar adalah kebijakan besar dalam rangka mewujudkan transformasi pengelolaan pendidikan di Indonesia. Salah satunya dengan menghapus Ujian Nasional (UN) diganti Asesmen Kompetensi. Asesmen nasional sendiri terdiri dari tiga bagian yaitu Asesmen Kompetensi Minimum (AKM), Survei Karakter dan Survei Lingkungan Belajar.

AKM dan Survei Karakter terdiri dari soal-soal yang mengukur kemampuan bernalar menggunakan bahasa, kemampuan bernalar menggunakan numerasi, dan penguatan pendidikan karakter. AKM dirancang untuk mengukur capaian peserta didik dari hasil belajar kognitif yaitu literasi dan numerasi (Wahyuningsih, 2020). Fokus kemampuan literasi dan numerasi tidak kemudian mengecilkan arti dari pentingnya mata pelajaran lain. Justru dengan literasi dan numerasi ini membantu siswa mempelajari bidang ilmu lain, terutama untuk berpikir dan mencerna informasi dalam bentuk tertulis dan dalam bentuk angka atau kuantitatif.

Kompetensi minimum adalah kompetensi dasar yang dibutuhkan siswa untuk bisa belajar, apapun materinya dan apapun mata pelajarannya. Sehingga materi AKM ada dua yaitu terkait literasi atau baca tulis, serta literasi numerasi. AKM memilih literasi dan numerasi karena literasi membaca dan numerasi adalah dua kompetensi minimum bagi siswa untuk belajar sepanjang hayat dan dapat berkontribusi kepada masyarakat.

Namun, literasi yang dimaksudkan di sini bukan sekedar kemampuan membaca, tapi juga kemampuan menganalisis suatu bacaan serta kemampuan untuk mengerti atau memahami konsep di balik tulisan tersebut. Sedangkan numerasi adalah kemampuan menganalisis menggunakan angka. Serta menekankan literasi dan numerasi bukan tentang mata pelajaran bahasa atau matematika, melainkan kemampuan murid agar dapat menggunakan konsep literasi ini untuk menganalisa sebuah materi.

Pentingnya Kompetensi dan Profesionalisme Guru Menjawab Globalisasi

Sulit disangkal bahwa guru memainkan peran teramat penting dalam menghasilkan sumberdaya manusia yang berkualitas, berdaya saing, dan terampil, terutama untuk menjawab tuntutan persaingan global. Tanpa SDM yang berkualitas dan terampil, masyarakat Indonesia akan kurang mampu mengambil manfaat dalam persaingan untuk merebut peluang yang ada guna meningkatkan taraf hidup. Kesemuanya itu mengindikasikan adanya tantangan yang dihadapi guru semakin kompleks dan berat. Guru bukan hanya dituntut untuk meningkatkan profesionalisme, tetapi juga kompetensi yang sesuai dengan situasi abad 21. Untuk itu guru dituntut mampu menghasilkan keluaran siswa yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, literasi membaca – menulis - berhitung, kreatif, berpikir kritis, mampu berkomunikasi dengan berbagai pihak, dan menyampaikan pemikiran/gagasan, mampu berkolaborasi dalam memecahkan permasalahan yang kian kompleks, literasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK), serta berkarakter dan berwawasan kebangsaan.

Pembelajaran masa kini dan akan datang menuntut guru untuk memiliki kompetensi dengan ciri: mampu mengembangkan perencanaan pembelajaran tuntas dan efektif; b) mengembangkan sikap kepemimpinan visioner yang berorientasi pada pencapaian hasil lebih baik, mampu berkomunikasi secara menarik, menyenangkan, dan efektif dalam menyampaikan materi pembelajaran, dengan mendayagunakan segenap potensi dan kemampuan mengelola tekanan psikologis (*stress*) dalam pembelajaran, mampu mengembangkan sikap kreatif dan inovatif bagi diri sendiri dan mendorong kemunculan sikap kreatif siswa, mampu memanfaatkan metode pembelajaran secara baik dan mendorong siswa aktif mengomunikasikan pemikiran dan gagasan, mampu memanfaatkan teknologi komputer dan teknologi digital dalam pembelajaran, mengembangkan kolaborasi pembelajaran melalui pendekatan *problem based learning* dan *project based learning*, dan lain-lainnya. Eksplisit, guru dituntut kompeten dan profesional dengan memenuhi standar kompetensi, yaitu: kompetensi kognitif di antaranya menguasai materi pembelajaran, menguasai berbagai metode yang disesuaikan dengan materi pembelajaran; kompetisi yang afektif yang meliputi harga diri, mempunyai

kepedulian dalam pengembangan pendidikan dan wawasan luas terhadap perubahan yang terjadi; dan kompetisi psikomotor yaitu penguasaan sejumlah ketrampilan yang berkaitan dengan bidang studi garapannya. Guru yang professional juga harus mampu mendisiplinkan diri dalam mengatur waktu untuk kepentingan diri, tugas dan kemasyarakatan (Paraba, 2000)

Peran MGMP sebagai wadah *entry point* peningkatan kompetensi dan profesional guru

MGMP adalah forum atau wadah kegiatan profesional guru mata pelajaran pada SMP/MTs, SMPLB/MTsLB, SMA/MA, SMALB/MALB yang berada pada satu wilayah/kabupaten/kota/kecamatan/sanggar/gugus sekolah yang berfungsi sebagai sarana untuk saling berkomunikasi, belajar, dan bertukar pikiran dan pengalaman dalam rangka meningkatkan kinerja guru sebagai praktisi/pelaku perubahan reorientasi pembelajaran kelas. Organisasi MGMP SMP/MTs berada dibawah naungan Dinas Pendidikan tingkat kabupaten/kota (Depdiknas, 2008). MGMP dilakukan oleh guru-guru yang memiliki kemampuan (tutor inti atau pemandu bidang studi/mata pelajaran), yang sebelumnya telah mendapatkan penataran oleh Kemdiknas. Wadah ini diharapkan dapat meningkatkan kompetensi dan profesionalisme guru untuk belajar, baik berupa sikap, kemampuan, pengetahuan, maupun keterampilan, sehingga memiliki dampak positif bagi para murid-muridnya (Werkanis & Hamadi, 2005).

Organisasi MGMP memiliki beberapa fungsi, yaitu menyusun program jangka panjang, menengah, dan pendek serta mengatur jadwal tempat dan kegiatan secara rutin; memotivasi para guru untuk mengikuti kegiatan MGMP secara rutin, baik di tingkat sekolah, wilayah, maupun kota; meningkatkan mutu profesional guru dalam pengajaran, evaluasi, dan pembelajaran di dalam kelas sehingga mampu meningkatkan mutu pendidikan di sekolah; mengembangkan program layanan supervisi akademik klinis yang berkaitan dengan pembelajaran yang efektif; mengembangkan silabus dan melakukan Analisis Mata Pelajaran (AMP), Program Tahunan (Prota), Program Semester (Prosem), Rencana Pelajaran (RPP), dan KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal).

Dibentuknya organisasi MGMP memiliki beberapa tujuan, yaitu memperluas wawasan

dan pengetahuan guru khususnya penguasaan substansi materi pembelajaran, penyusunan silabus, penyusunan bahan-bahan pembelajaran, strategi pembelajaran, metode pembelajaran, memaksimalkan pemakaian sarana/prasarana belajar, memanfaatkan sumber belajar, dan sebagainya; memberikan kesempatan kepada anggota atau musyawarah kerja untuk berbagi pengalaman serta saling memberikan bantuan dan umpan balik; meningkatkan pengetahuan dan keterampilan; memberdayakan dan membantu anggota kelompok kerja dalam melaksanakan tugas-tugas pembelajaran di sekolah; mengubah budaya kerja anggota kelompok kerja atau musyawarah kerja dan mengembangkan profesionalisme di tingkat MGMP; meningkatkan mutu proses pendidikan dan pembelajaran yang tercermin dari peningkatan hasil belajar peserta didik; dan meningkatkan kompetensi guru melalui kegiatan-kegiatan di tingkat MGMP.

Banyak manfaat yang diperoleh oleh guru mapel yang terlibat di MGMP. Penelitian Islahuddin (2018) menyimpulkan kegiatan MGMP telah mampu meningkatkan kinerja guru Bahasa Indonesia dalam merencanakan pembelajaran, menerapkan strategi pembelajaran, mengelola kelas dan mengevaluasi pembelajaran. Dengan demikian pelaksanaan MGMP yang dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip manajemen sumberdaya manusia dapat meningkatkan kinerja guru Bahasa Indonesia dalam pembelajaran. Selain itu, penelitian Anwar (2017) menyatakan meski banyak faktor yang mempengaruhi profesionalisme guru dalam pembelajaran, namun secara keseluruhan MGMP cukup berpengaruh signifikan terhadap profesionalisme kinerja mengajar guru.

Pemberdayaan MGMP, dan Aspek Pendukung

Pendirian suatu organisasi, apapun bentuknya, diharapkan mampu menunjukkan keberdayaannya, sehingga dapat mempertahankan keberlangsungannya dan efektif. Secara sederhana pengertian berdaya berasal dari kata dasar daya, artinya berkekuatan, berkemampuan, bertenaga, mempunyai akal (cara dan sebagainya) untuk mengatasi sesuatu dan sebagainya (KBBi). Tidak terkecuali dengan MGMP, memerlukan keberdayaannya baik dari segi organisasi dan pengelolaan, proses, aktivitas, maupun efektivitas hasilnya. Untuk itu MGMP yang berdaya haruslah didukung oleh

sejumlah aspek bersifat organisatoris maupun non-organisatoris, manusiawi maupun non-manusiawi. Aspek pendukung itu, antara lain: manajemen dan organisasi, kepengurusan, kegiatan, partisipasi/keterlibatan anggota, dukungan sarana-prasarana, pendanaan, sumber belajar.

MGMP adalah organisasi yang pelaksanaan kegiatannya harus dilengkapi dengan Surat Penetapan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) MGMP. Kepengurusan MGMP mengatur kepengurusan dan keanggotaan dengan berbagai tugas pokok dan fungsi. Pengurus MGMP terdiri dari: satu orang ketua, satu orang sekretaris, satu orang bendahara, dan tiga orang ketua bidang, yaitu (1) bidang perencanaan dan pelaksanaan program; (2) bidang pengembangan organisasi, administrasi, sarana dan prasarana; dan (3) bidang hubungan masyarakat dan kerjasama. Pengurus MGMP dipilih oleh anggota berdasarkan AD/ART.

Aktivitas MGMP pada dasarnya merupakan bagian utama dalam pengembangan MGMP. Program tersebut merujuk pada usaha peningkatan kompetensi dan profesionalisme guru. Terdiri dari Program umum adalah program yang bertujuan untuk memberikan wawasan kepada guru tentang kebijakan-kebijakan pendidikan di tingkat daerah sampai pusat, seperti kebijakan terkait dengan pengembangan profesionalisme guru. Program inti adalah program utama yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas kompetensi dan profesionalisme guru yang dapat dikelompokkan ke dalam program rutin dan program pengembangan. Program penunjang bertujuan utk menambah pengetahuan dan keterampilan peserta dengan materi yang bersifat penunjang seperti bahasa asing, TIK, dan lain-lain.

Partisipasi merupakan pelibatan anggota untuk mendukung pencapaian tujuan dan hasil organisasi. MGMP membutuhkan partisipasi anggota yang berasal dari guru mata pelajaran sekolah negeri dan guru sekolah swasta, baik yang berstatus PNS maupun bukan PNS (setiap mata pelajaran membentuk MGMP), guru yang berasal dari 8 –10 sekolah atau disesuaikan dengan kondisi daerah setempat dan pembentukannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berbagai aspek partisipasi dapat diwujudkan oleh anggota, bukan hanya konsistensi partisipasi kehadiran dan keaktifan dalam kegiatan, tetapi bentuk

partisipasi lain, baik materi maupun non-materi. Materi misalnya mendukung ketersediaan sarana dan prasarana minimal Komputer, OHP/LCD Proyektor, dan Telepon dan Facsimile.

Dari segi pembiayaan adalah salah satu komponen penting untuk terlaksananya program MGMP sesuai yang diharapkan. Beberapa sumber dana MGMP yang dapat dimanfaatkan antara lain: iuran anggota, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), APBN, APBD, Komite Sekolah/Dewan Pendidikan, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Provinsi, LPMP, P4TK, Direktorat terkait, donatur yang tidak mengikat, unit produksi, hasil kerjasama, masyarakat, atau sponsor yang sah dan tidak mengikat. Dana yang diperoleh dapat dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan rutin maupun pengembangan melalui mekanisme penggunaan sesuai ketentuan.

METODE PENELITIAN

Kajian ini merupakan sebagian dari hasil penelitian mengenai MGMP di tahun 2020. Penelitian merupakan bentuk studi kasus yang dilaksanakan dengan pendekatan kualitatif deskriptif di MGMP di wilayah Kabupaten Limapuluh Kota, Sumatera Barat. Pengumpulan data dilaksanakan melalui pembagian kuesioner, wawancara dan diskusi kelompok terpumpun (DKT).-

MGMP guru SMP di Kabupaten Limapuluh Kota kota dipilih sebagai sasaran penelitian karena daerah ini dinilai telah mampu meningkatkan kompetensi dan profesionalitas pembelajaran guru-gurunya, diindikasikan dengan perolehan hasil belajar siswa yang tergolong baik dan merata. Dengan anggaran pendidikan yang terbatas menempati peringkat terendah nomor 2 dari 19 daerah di Sumatera Barat, namun berhasil memperoleh penghargaan tertinggi dari pemerintah pusat dan PGRI yang dinilai memiliki perhatian dan komitmen tinggi terhadap pembangunan pendidikan, profesional dan kesejahteraan guru. Pencapaian prestasi akademis siswa SMP untuk tingkat provinsi dinilai sangat membanggakan (lihat tabel 1).

Sumber data diperoleh dari informan yang mengetahui secara jelas dan rinci mengenai masalah yang diteliti. Kegiatan DKT dilakukan dengan melibatkan *stakeholder*: Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik), Kabid Pembinaan Ketenagaan, Kasi Kurikulum Dikdas, para ketua/pengurus MGMP guru mapel dari 14 SMP.

Tabel 1. Capaian Nilai Ujian Nasional SMP Tahun 2018/2019 Provinsi Sumatera Barat

NO	NAMA KOTA/KABUPATEN	RERATA NILAI PADA MATA UJI				RERATA NILAI
		BAHASA INDONESIA	BAHASA INGGRIS	MATEMATIKA	IPA	
1	KOTA BUKITINGGI	76,41	59,76	59,35	61,44	64,24
2	KOTA PAYAKUMBUH	74,52	55,22	53,08	57,19	60,00
3	KOTA PADANG PANJANG	73,87	53,73	52,06	54,83	58,62
4	KOTA PADANG	72,22	54,06	53,09	54,32	58,42
5	KABUPATEN TANAH DATAR	72,55	49,73	48,97	51,92	55,79
6	KOTA SAWAHLUNTO	73,22	50,65	46,74	51,56	55,54
7	KOTA PARIAMAN	68,45	49,05	47,64	52,22	54,34
8	KOTA SOLOK	69,22	49,46	46,48	50,47	53,91
9	KABUPATEN LIMAPULUH KOTA	70,7	46,12	45,7	50,79	53,33
10	KAB. KEPULAUAN MENTAWAI	64,11	49,29	52,63	45,08	52,78
11	KABUPATEN AGAM	68,66	46,54	44,91	48,58	52,17
12	KABUPATEN PESIR SELATAN	63,61	47,05	46,57	48,82	51,51
13	KABUPATEN DHARMASRAYA	67,69	46,16	43,75	48,05	51,41
14	KABUPATEN SIJUNJUNG	67,52	45,66	43,51	46,89	50,90
15	KABUPATEN SOLOK	67,61	44,48	43,52	45,55	50,29
16	KABUPATEN PASAMAN BARAT	66,49	44,9	43,36	45,27	50,01
17	KABUPATEN PASAMAN	66,21	42,63	41,5	43,76	48,53
18	KABUPATEN SOLOK SELATAN	65,98	43,03	40,76	43,44	48,30
19	KABUPATEN PADANG PARIAMAN	63,66	43,17	41,34	44,36	48,13
	RERATA UN SUMATERA BARAT	68,78	48,32	47,11	49,63	53,46
	NASIONAL	65,69	50,23	46,56	48,73	52,82

Sumber: Puspendik, 2019

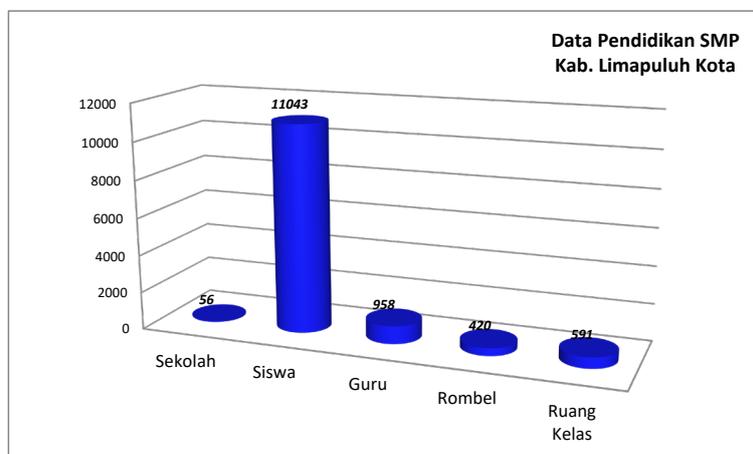
Teknik analisis data menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif deskriptif, yaitu penggambaran data dengan pola deskriptif atau telaah atau simpulan agar mudah dibaca dan bermakna, diperkaya dengan informasi kualitatif yang diperoleh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Singkat Pendidikan SMP di Kab. Limapuluh Kota

Berikut disajikan profil singkat pendidikan jenjang SMP di Kab. Limapuluh Kota. Grafik 1 menggambarkan perkembangan pendidikan SMP meliputi jumlah sekolah, peserta didik, guru, rombongan belajar (rombel), dan ketersediaan ruang kelas. Terdapat 56 SMP meliputi 47 SMP negeri dan 9 swasta (Kemendikbud, 2020).

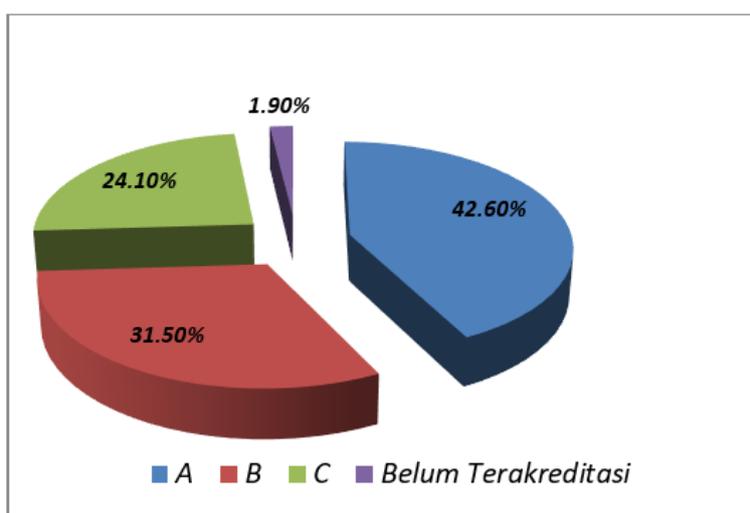
Grafik 1 Perkembangan Data Pendidikan SMP Kab. Limapuluh Kota



Sumber: Dapodik PAUD dan Dikdamen, 2020

Sebagai bagian dari pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) dalam pemenuhan akreditasi sekolah, sebanyak 42,6 % SMP terakreditasi A, 31,5 % terakreditasi B, 24,1 % terakreditasi C, dan terdapat 1,9 % belum terakreditasi (Grafik 2). Jika akreditasi sekolah sebagai acuan dalam upaya peningkatan mutu dan rencana pengembangan sekolah, maka perlu upaya maksimal dari sekolah maupun dinas setempat untuk meningkatkan SNP yang telah ditentukan. Dengan informasi ini, hasil akreditasi dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan peningkatan mutu pendidikan nasional dan daerah.

Grafik 2 Akreditasi SMP di Kab. Limapuluh Kota

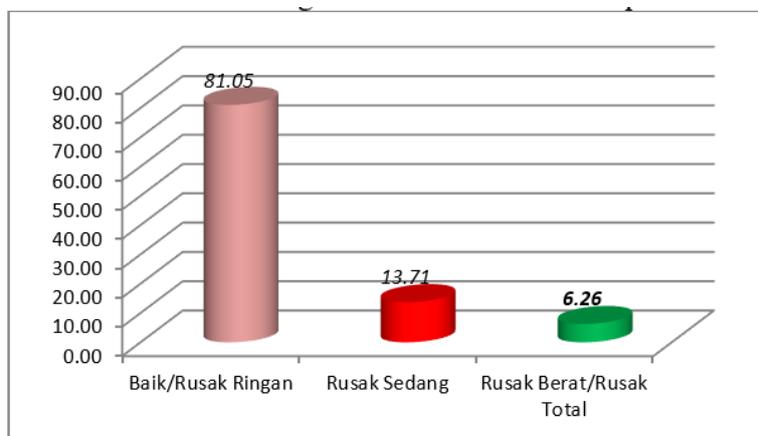


Sumber: BAN S/M, Oktober 2019

Dalam penyelenggaraan Ujian Nasional (UN) tahun 2019, terdapat 2 pilihan sistem ujian yaitu UNBK (Ujian Nasional Berbasis Komputer) dan UNKP (Ujian Nasional Berbasis Kertas Pensil). Pada ujian SMP tahun 2019, sebanyak 72,9 % sekolah telah menyelenggarakan UNBK dan 27,1 % masih menyelenggarakan UNKP (Puspendik, 2019).

Ketersediaan ruang kelas adalah bagian layanan ketersediaan prasarana pendidikan, yaitu terdapat 591 ruang kelas tersebar di 56 SMP (Grafik 3). Dilihat kelayakan ruang kelas, terdapat 479 (81.05%) ruang kelas kondisi baik/rusak ringan, 75 (13,71%) kondisi rusak sedang, dan 37 (6,26%) dengan kondisi ruang kelas rusak berat/rusak total.

Grafik 3 Kondisi Ruang Kelas SMP di Kab. Limapuluh Kota



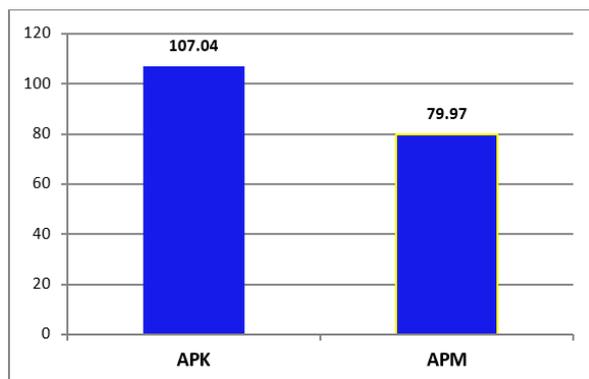
Sumber: Data verifikasi PDSPK, Juli 2019

Untuk mengetahui banyaknya siswa yang bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu di suatu daerah dapat dilihat dari Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). APK adalah perbandingan antara siswa pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah dan dinyatakan dalam persentase. Makin tinggi APK berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di jenjang pendidikan tertentu atau banyak anak di luar usia sekolah (Kemendikbud, 2017).

Sedangkan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang bersekolah pada jenjang yang sesuai dapat dilihat APM daerah tersebut. APM adalah perbandingan antara siswa usia sekolah tertentu pada jenjang pendidikan dengan penduduk usia yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Makin tinggi APM berarti makin banyak anak usia sekolah yg bersekolah sesuai usia resmi di jenjang pendidikan tertentu. Nilai idealnya 100%.

Grafik 4 menggambarkan APK SMP Kab. Limapuluh kota 107,04 artinya masih banyak anak usia sekolah yang bersekolah di jenjang pendidikan SMP atau di luar usia sekolah pada jenjang tersebut. Namun APM SMP masih dibawah 100 yaitu 79,97 atau dibawah ideal artinya banyak anak usia sekolah yang bersekolah sesuai usia resmi di jenjang tersebut.

Grafik 4 APK dan APM SMP Kab. Limapuluh Kota Tahun 2019



Sumber: npd.Kemendikbud, 2019

Kegiatan MGMP Mapel SMP di Kab. Limapuluh Kota

Menurut Kabid Ketenagaan Disdik setempat, pada perkembangannya, saat ini terdapat 10 MGMP mapel SMP meliputi MGMP bahasa Indonesia,

MGMP IPA, MGMP Bahasa Inggris, MGMP IPS, MGMP Prakarya, MGMP Seni Budaya, MGMP PJOK, MGMP PPKN, MGMP Matematika, dan MGMP Pendidikan Agama Islam, yang masing-masing memiliki ketua dan pengurus.

Tabel 2 Sebaran Pengurus MGMP Mapel SMP

No.	Sekolah	MGMP
1.	SMPN 1 Luak Kab. Limapuluh Kota	Ketua MGMP Bahasa Indonesia
2	SMPN 2 Harau Kab. Limapuluh Kota	Ketua MGMP mapel IPA
3	SMPN 2 Kab. Limapuluh Kota	Ketua MGMP Bahasa Inggris
4	SMPN 3 Pangkalan Koto Baru, Kab. Limapuluh Kota	Ketua MGMP mapel IPS
5	SMPN 1 Guguak Kab. Limapuluh Kota	Ketua MGMP mapel Prakarya
6	SMPN 2 Kapur IX Kab. Limapuluh Kota	Ketua MGMP mapel Seni Budaya
7	SMPN 4 Payakumbuh	Ketua MGMP mapel PJOK
8	SMPN 1 Payakumbuh	Ketua MGMP mapel PPKN
9	SMPN 1 Payakumbuh	Ketua MGMP mapel Matematika
10	SMPN 3 Harau, Kab. Limapuluh Kota	Sekretaris MGMP mapel Pend. Agama Islam (PAI)
11	SMPN 2 Situjuah, Limo Nagari, Kab. Limapuluh Kota	Pengurus MGMP mapel Bahasa Inggris

MGMP mapel SMP atau perkumpulan bagi guru SMP mata pelajaran yang berada di Kab. Limapuluh Kota melakukan fungsinya sebagai sarana komunikasi, belajar, bertukar pikiran dan pengalaman dalam rangka meningkatkan kinerja guru dalam pembelajaran. Sama halnya dengan persyaratan keberadaannya, MGMP di Kab. Limapuluh Kota mempunyai struktur kepengurusan, dasar hukum, visi, misi dan tujuan yang jelas. Implementasinya, program MGMP masing-masing guru mapel memiliki kesamaan persepsi dan komitmen yang tinggi untuk meningkatkan karirnya yang terhimpun dalam kegiatan, dan mampu meningkatkan motivasi, frekuensi, dan intensitas kegiatan pengembangan kariernya.

Salah satu tujuan yang ingin dicapai melalui kegiatan MGMP adalah memperluas wawasan dan pengetahuan guru dalam berbagai hal, penyusunan dan pengembangan silabus, RPP, menyusun bahan ajar berbasis Teknologi

Informasi dan Komunikasi (TIK), membahas materi esensial yang sulit dipahami, strategi/metode/pendekatan/media pembelajaran, sumber belajar, kriteria ketuntasan minimal, pembelajaran remedial, soal tes untuk berbagai kebutuhan, menganalisis hasil belajar, menyusun program dan pengayaan, dan membahas berbagai permasalahan serta mencari alternatif solusinya, bahkan memberi kesempatan kepada guru untuk berbagi pengalaman serta saling memberikan bantuan dan umpan balik, mengembangkan kegiatan *mentoring* dari guru *senior* kepada guru *junior* (Depdiknas, 2009).

Masing-masing MGMP mapel memiliki pola pengelolaan yang berbeda misalnya Kegiatan MGMP IPS pernah rutin melaksanakan kegiatan dalam 8 minggu (16 kali pertemuan, 1 hari = 2 kali pertemuan) dan ditambah 1 kali pertemuan sehingga menjadi 17 kali pertemuan. Dinas berperan mengawasi materi kebijakan dan berbagai informasi teknis yang berkaitan dengan pengembangan karir guru. Sosialisasi dan implementasi K-13 dan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Juga dibahas tentang Penilaian Kinerja Guru (PKG) dan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB). Kegiatan dalam bentuk workshop atau bimtek melibatkan narasumbernya Dinas dan Widyaaiswara LPMP.

Lain lagi dengan MGMP mapel Matematika, dalam kegiatannya di tahun 2019 menggelar Pelatihan dan Penggunaan Augmented Reality (AR) dalam Pembelajaran Matematika yang dirancang menggunakan prinsip penampilan objek 3D (tiga dimensi) di kalangan MGMP bagi guru Matematika se-Kabupaten Limapuluh Kota memperbaharui bahan ajar. MGMP melakukan Program Kemitraan Masyarakat (PKM) Universitas Negeri Padang yang merupakan salah satu program tahunan.

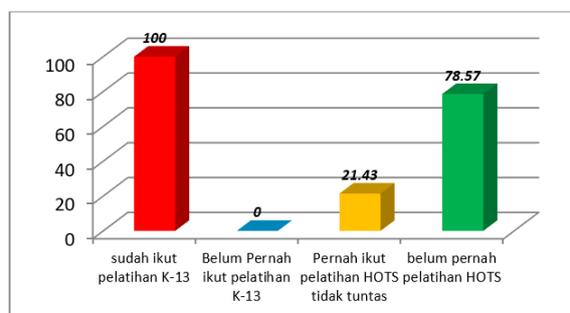
Banyak manfaat yang diperoleh dengan terlibat di MGMP, Uslimah (2006) menyimpulkan ada peningkatan dari keterampilan guru Biologi setelah mengikuti kegiatan MGMP dalam penguasaan materi, kemampuan dalam perencanaan dan mengelola pembelajaran, serta melakukan evaluasi menjadi lebih baik. Selain pertemuan, guru juga harus terlibat dan berpartisipasi dalam pelatihan. Guru diberikan kesempatan untuk meningkatkan dan mengembangkan keprofesionalannya melalui beberapa pelatihan, agar dapat meningkatkan kemampuannya dalam menguasai materi pembelajaran,

mengembangkan materi pembelajaran dalam pelaksanaan proses kegiatan belajar, misalnya pelatihan terkait K-13.

Pada era kolaborasi, guru juga sudah harus melepaskan diri dari kebiasaan bekerja sendiri-sendiri. Dengan K-13, guru harus mengembangkan kebiasaan baru bekerja kooperatif sebagai anggota *community of educators* di satuan pendidikan masing-masing. Kerja sama antar guru dalam satu satuan pendidikan dalam merencanakan, mengembangkan pembelajaran, penilaian dan upaya-upaya bersama guna peningkatan merupakan sesuatu yang diperlukan saat ini (Sutjipto, 2016).

Grafik 5 menggambarkan hampir semua pengurus dan guru MGMP mapel SMP peserta DKT di Kab. Limapuluh Kota telah mengikuti pelatihan K-13. Dengan terlibat secara aktif pada pelatihan terkait K-13, seseorang paling tidak memiliki tiga pengalaman, yaitu: 1) pemahaman terhadap ide dan desain kurikulum, 2) strategi penyajian implementasi kurikulum, dan 3) menyampaikan konsep kurikulum (Kemdikbud, 2016).

Grafik 5. Keikutsertaan Guru dalam Pelatihan K-13 dan HOTS



Sumber: Hasil DKT Ketua/pengurus MGMP mapel SMP

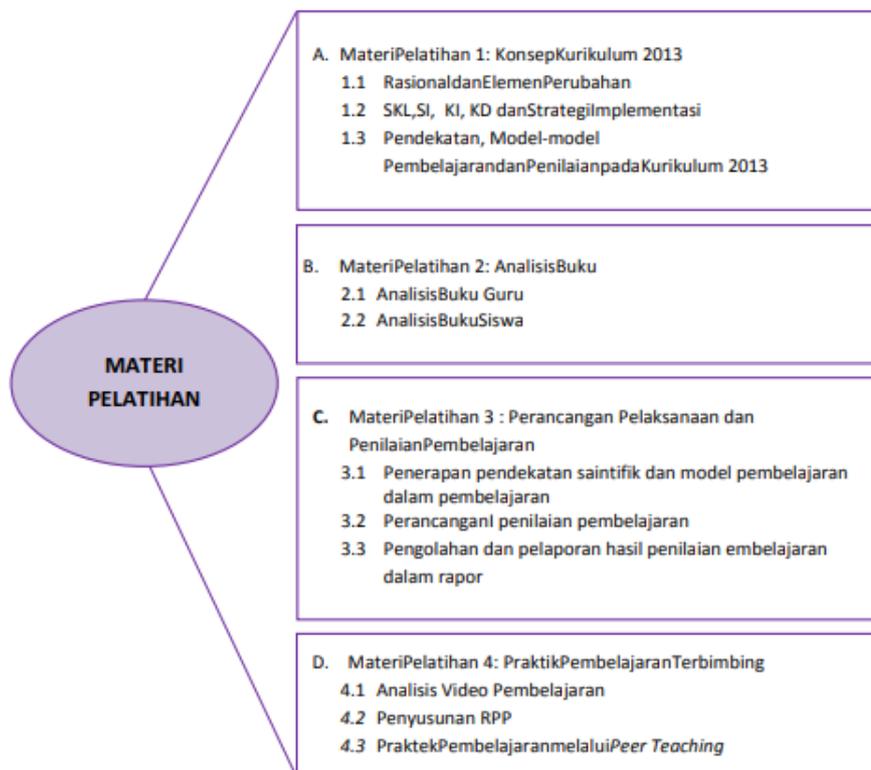
Utamanya setelah mengikuti pelatihan implementasi K-13, guru mampu melaksanakan tugas sesuai dengan tuntutan kompetensi lulusan, isi, proses pembelajaran, dan penilaian K-13. Sutjipto (2016) juga mengungkapkan bahwa pelatihan implementasi K-13 bagi guru merupakan perhelatan seni mengolah berbagai tujuan untuk menyelaraskan kebijakan yang diprogramkan melalui ajang berbagi guna mewujudkan pemahaman bersama yang ideal terhadap ide, rancangan, dan pengimplementasiannya.

Selain K-13, dalam menuju pembelajaran abad 21, saat ini para guru mulai diperkenalkan pembelajaran *Higher Order Thinking Skill* (HOTS). Pengembangan pembelajaran HOTS atau keterampilan berpikir tingkat tinggi adalah program pengembangan Kemdikbud melalui Ditjen GTK dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dan kualitas lulusan. Pemerintah mengharapkan para peserta didik mencapai berbagai kompetensi dengan penerapan HOTS. Kompetensi tersebut adalah berpikir kritis (*critical thinking*), kreatif dan inovasi (*creative and innovative*), kemampuan berkomunikasi (*communication skill*), kemampuan bekerja sama (*collaboration*) dan kepercayaan diri (*confidence*).

Berdasarkan hasil diskusi dan tanya jawab, tentang pembelajaran berorientasi keterampilan berpikir aras tinggi (HOTS), sebagian besar pengurus/guru mapel SMP mengaku belum pernah mengikuti pelatihan HOTS. Dikemukakan ketua MGMP Seni Budaya, umumnya guru sudah pernah mengikuti pelatihan K-13 namun secara khusus belum pernah ikut pelatihan HOTS. Kalaupun pernah, tidak utuh sebatas pengenalan atau materi selingan pelatihan K-13. Hal senada disampaikan ketua MGMP mapel PJOK, materi pembelajaran tentang HOTS pernah diperkenalkan pada sesi terakhir pelatihan K-13 namun selintas dan tidak mendalam. Bahkan ketua MGMP IPA mempertegas sebagian besar guru mapel IPA belum pernah ikut pelatihan HOTS. Ada satu orang guru yang pernah ikut pelatihan HOTS, namun teknisnya belum secara utuh, sebatas sosialisasi.

Seorang guru peserta DKT, mapel bahasa Inggris, mengaku pernah mengikuti pelatihan HOTS bagaimana membuat soal dan pembuatan soal-soal UN yang diselenggarakan oleh Puspendik, namun hanya melalui daring/video tutorial, jadi tidak semua materi tuntas, peserta hanya diberi *flashdisk* untuk dipelajari.

GAMBARAN STRUKTUR MATERI PELATIHAN IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013



Sumber: Materi Pelatihan Implementasi Kurikulum 2013, Pusat Pengembangan Profesi Pendidik Badan Pengembangan SDM Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan, Kemdikbud 2014.

Pengelolaan dan Kegiatan MGMP Mapel SMP

Guru merupakan orang profesional atau ahli yang memerlukan kompetensi dalam menjalankan pekerjaannya. Menurut Sagala (2009:209) kompetensi merupakan kemampuan yang harus dimiliki oleh guru dalam menjalankan tugas dengan profesional. Sedangkan Daryanto dan Tasrial (2015) mengatakan bahwa kompetensi merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya.

Dalam POS MGMP, ada tiga jenis program yang dapat dirancang untuk kegiatan MGMP, yaitu program umum, program inti (program rutin dan program pengembang) dan program penunjang. Program tersebut harus rinci memuat sejumlah kegiatan untuk setiap pertemuan. Program untuk satu tahun sekurang-kurangnya memuat 12 kegiatan. Dalam penyusunan program MGMP dipilih program yang menjadi prioritas, baik program rutin maupun program pengembangan. Keseluruhan program MGMP menjadi tanggungjawab pengurus. Masing-masing program sebaiknya mempunyai penanggungjawab program. Penanggungjawab program bekerja berdasarkan kerangka acuan kerja yang telah disepakati oleh keseluruhan anggota MGMP. Tugas penanggungjawab program adalah melaksanakan dan mengelola program sesuai dengan kerangka acuan kerja.

MGMP pada hakikatnya sebagai sarana untuk berkumpulnya guru mata pelajaran yang sejenis untuk membahas persoalan yang berkaitan mata pelajaran yang bersangkutan, termasuk di dalamnya adalah tentang pembuatan perangkat pembelajaran, pembuatan bahan ajar, metode maupun-masing. model pembelajaran berdasarkan lingkungan sekolah masing, selain itu, tentu untuk saling embagi informasi pendidikan yang bersifat kekinian.

Dengan segala ketebatasan dan kendala yang ada, pengelolaan dan kegiatan MGMP SMP di Kab. Limapuluh Kota dapat dikatakan tetap hidup meski terkendala masalah klasik seperti dana, lokasi dan waktu yang bersamaan dengan jam mengajar. MGMP tidak sekedar wadah silaturahmi dan kumpul semata, namun sebagai wadah bertukar pikiran, bertukar pengalaman, dan menambah wawasan serta mendapatkan ilmu. Masih banyak guru SMP mapel tetap semangat mengikuti kegiatan MGMP untuk

meningkatkan kompetensinya, yang manfaatnya dirasakan salah seorang guru bahasa Inggris bahwa MGMP sebagai tempat pengimbasan guru dan dibahas bersama-sama.

Guru mapel bahasa Inggris dari SMPN 2 Situjuh, tersebut beranggapan program yang ada di MGMP sangat besar sekali untuk meningkatkan mutu belajar, misalnya dalam proses pembelajaran; *“disana kami saling sharing tentang metode pembelajaran bagaimana meningkatkan mutu kualitas pendidikan bagi siswa kemudian gurunya, mungkin dalam pembahasan soal-soal Ujian Nasional (UN)”*.

Hal serupa yang dilakukan oleh MGMP Prakarya, rutin pertemuan bulanan 12 kali dalam setahun, membahas K-13, membuat soal HOTS, *mid* dan *essay* dalam soal bercerita dengan berbagai topik, dan menyusun pertanyaan. Menurut ketuanya, dengan pengalaman membuat soal, para guru dapat merasakan hal baru terkait mapel Keterampilan yang nyatanya belum sesuai dengan K-13. Karena apa yang pernah diajarkan selama ini hanya mengandung 2 aspek yaitu kerajinan dan pengolahan.

Melakukan kegiatan dengan kolaborasi guru dan narasumber adalah salah upaya memperkuat kelompok kerja MGMP (Lie, 2020). Hal ini pula sebagai usaha pelibatan guru dalam area untuk mengembangkan dan melaksanakan kegiatan, program kolaborasi guru dan rekan, mentoring dan pendampingan, dan upaya berkelanjutan dalam periode waktu yang memadai. Kehadiran nara sumber (narsum) diharapkan bisa memberikan warna dan kontekstualisasi bagi pengetahuan dan wawasan baru untuk pembelajaran. Seperti yang dilakukan MGMP mapel Matematika dan MGMP mapel bahasa Indonesia. Guru menjadi mentoring pada MGMP mapel Matematika sudah terbiasa, kegiatan pertemuan MGMP dijadikan sebagai wadah koordinasi para guru mapel untuk berbagi ilmu. Biasanya jika ada anggota yang telah selesai mendapat pelatihan terkait materi pembelajaran Matematika, akan di *share* dan dikembangkan dalam pertemuan MGMP.

Pada MGMP mapel Bahasa Indonesia, agar pertemuan tidak monoton, anggota sepakat selalu mengundang narsum yang kompeten dari luar. Biasanya materi yang terkait penilaian dan masalah HOTS. Alasan mendatangkan nara sumber adalah agar dapat substansi lebih baik. Hal ini dilakukan karena sebagian besar guru mapel bahasa Indonesia sudah berusia lanjut. Hal

ini berhasil mejadi daya tarik para anggota MGMP untuk aktif dan datang dalam pertemuan MGMP. Adapula transfer ke teman atau rekan sejawat, misalnya untuk membahas materi soal yang 25 persen dari pusat. Tidak sedikit guru mengalami kesulitan saat dibahas kepada siswa karena banyak kisi-kisi yang tidak sampai. MGMP juga melakukan kegiatan analisis dengan panduan langsung dari dinas. Untuk materi pertemuan, pengurus selalu menawari ke anggota untuk membuat perencanaan pembelajaran mapel bahasa Indonesia bagamaimana penyusunan model soal bahasa Indonesia agar menjadi menarik seperti HOTS.

Ketika masih mengajar di Aceh, ketua MGMP mapel PJOK mengaku belum mengenal adanya MGMP. Mengetahui MGMP ketika mengajar di Kab. Limapuluh Kota. MGMP selama ini melakukan pertemuan dengan pemberdayaan instruktur dari internal tentang K-13. Jika ada materi khusus, MGMP memanggil narasumber dari pengawas sebagai penguatan, misalnya penyusunan soal USBN dengan mengkondisikan arahan dinas. Untuk penyusunan soal UNBK, MGMP selalu mempelajari kisi-kisi dari pusat, namun anggota sepakat karena belum terbiasa menyusun soal teori seperti maka lebih banyak menyusun ke soal praktek, karena mapel PJOK sifat kegiatannya *free teaching*.

Berbagai cara dilakukan guna meningkatkan kompetensi pedagogik guru, seperti yang dilakukan MGMP mapel IPA. MGMP sering mendatangkan narasumber dari luar, utamanya membahas soal USBN yang terkait dengan HOTS. Hampir semua guru sekolah mapel IPA diarahkan oleh dinas ikut MGMP IPA, terlebih untuk kegiatan PKB, karena ada materi peningkatan pedagogik, dan keprofesionalan guru. Sisi positifnya, sejak PKB dilakukan di MGMP, para guru menjadi aktif dalam MGMP. Guru wajib mengikuti kegiatan MGMP minimal 12 kali pertemuan dalam satu tahun atau sebulan sekali. Nilai UKG dan PKG yang rendah, membuat para guru termotivasi mengikuti MGMP sehingga pertemuan rutin dilaksanakan seminggu sekali. Fasilitator kegiatan PKB di MGMP adalah Instruktur Nasional (IN) yang diambil dari guru-guru dengan nilai UKG terbaik. Masih ada keinginan MGMP IPA membuat jurnal guru, karena selama ini belum ada wadah menulis bagi para ilmu alam ini.

Terkait dengan pelatihan, ketua MGMP mapel PPKN juga mengaku belum pernah mendapat

pelatihan tentang HOTS secara utuh hanya selintas pada pelatihan K-13. Kegiatannya lebih berinisiatif dalam pembuatan soal, serta mengutus dan memberi kesempatan anggota yang cekatan dalam aktivitas sehari-hari untuk ikut pelatihan soal, yang nantinya dapat berbagi ilmu dalam kegiatan MGMP mapel.

Penyusunan silabus, pembuatan RPP, bahan ajar, item soal, penulisan butir soal, dan penulisan *best practice*, adalah bagian dari kegiatan MGMP IPS, meski media dan prakteknya di sekolah masing-masing. Dalam pertemuan MGMP sering melibatkan narasumber dari Universitas Negeri Padang (UNP), LPMP, serta pengawas disdik. Bahkan sejak tahun 2016, MGMP IPS telah berbadan hukum. Awal pembentukan, hanya 25 guru, kini sudah bertambah menjadi 121 guru. Dari awalnya mengajukan proposal ke Kemdikbud, dinilai layak dan mampu maka permintaan tersebut terealisasi dengan adanya bantuan dana (*blockgrant*) dari pusat.

Dalam pertemuan setiap satu bulan, berbagai permasalahan pembelajaran mapel IPS di sekolah, dibahas dan dicarikan solusi. Harapannya, kualitas proses pembelajaran dapat ditingkatkan. Kegiatan MGMP tidak hanya pendalaman materi, namun sering juga membahas ilmu kependidikan yang nantinya dapat diterapkan guru pada proses pembelajaran di kelas. Materinya diantaranya mengenai teori dan prinsip-prinsip pembelajaran IPS, pengembangan model dan teknik pembelajaran IPS. Harapannya, kegiatan ini akan meningkatkan kompetensi pedagogik guru IPS. Kegiatan difokuskan dengan 16 enam belas kegiatan selama 83 jam dalam bentuk *in-service* maupun *on-service* yang digulirkan dan melibatkan guru-guru mapel IPS pada SMP/ MTs di Kab. Limapuluh Kota.

Pertemuan MGMP bahasa Inggris lebih sering melaksanakan kegiatan penulisan soal HOTS. Meski ada kesulitan terutama guru yang baru dan belum mengerti, hal ini berdampak kepada siswa. Keluhan ini disampaikan ketua MGMP mapel, masih perlu kerja keras gurunya. Pengurus berharap agar MGMP lebih efektif, maka guru harus dilatih, dinas juga harus terlibat mau mendatangkan narasumber dari luar untuk membimbing menyusun soal secara profesional, memberdayakan guru dengan mengadakan pelatihan kegiatan sejenis berupa strategi model pembelajaran. Banyak guru yang semangat dan tertarik soal tentang HOTS, misalnya setiap

tahun Disdik kerjasama bedah SKL mendatangkan narsum dari pusat melakukan penulisan soal UN, beberapa guru pernah ikut pelatihan pembuatan UN oleh Puspendik meski lewat daring/video tutorial yaitu bagaimana membuat soal HOTS.

Seperti tidak kalah dari MGMP mapel lainnya, MGMP Seni Budaya aktif mendatangkan narsum dari luar dan dari internal rekan guru yang pengalaman dan sudah ikut pelatihan. Pada mapel seni budaya punya 4 cabang seni rupa, seni musik, seni tari, dan seni teater. Manfaat dalam MGMP adalah mampu bekerja secara kelompok, diskusi, setiap kesulitan di lapangan, untuk dibahas bersama.

Meski terkesan “bapak-nya” ada 2, kepegawaian guru Pendidikan Agama Islam (PAI) ke dinas pendidikan, namun pembelajaran lebih ke Kementerian Agama (Kemenag). Diakui oleh pengurus MGMP mapel PAI, pembinaan MGMP PAI lebih banyak dari Kemenag, demikian juga pelatihan dan sertifikasi. Sedangkan kepegawaian ada di pemda melalui dinas. Kegiatan MGMP meliputi pembahasan terkait USBN, mulai kisi-kisi soal dari Pendis Kemenag. Untuk penyusunan soal, beberapa guru anggota MGMP PAI sering mengikuti pelatihan di provinsi terutama dalam menyusun soal. Untuk USBN, PAI lebih dulu menyusun USBN kisi-kisi dari Kemenag.

Keanggotaan dan Pendanaan

Semua pengurus MGMP mapel sepakat bahwa setiap ada pertemuan, ada saja anggota yang tidak hadir dengan berbagai alasan. Namun tidak menyurutkan anggota lain untuk melakukan kegiatan. Menurut para ketua, biasanya mereka berhalangan hadir kendala ijin dari kepala sekolah, terutama sekolah swata. Alasan lain disampaikan pengurus MGMP bahasa Inggris, ketidakhadiran karena banyak guru yang honorer ikut anggota UKG, sementara guru juga harus mengajar di SD.

Melihat jumlah kehadiran anggota MGMP SMP masing-masing mapel dalam setiap pertemuan, rata-rata setiap kali pertemuan sebagian besar guru yang hadir mencapai 100 orang, seperti MGMP Matematika, IPA, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, serta MGMP mapel IPS. Bahkan, seperti yang diakui oleh pengurus MGMP IPA, karena keinginan yang kuat ingin menambah wawasan ada guru dari daerah lain dengan jarak yang jauh semangat ikut MGMP IPA meski bukan guru setempat.

Kehadiran narsum ternyata membawa dampak positif dan daya tarik minat anggota untuk aktif dalam pertemuan MGMP. Guru tidak peduli jika harus *urunan* untuk menyiapkan honor atau sewa tempat pertemuan. Menurut semua pengurus MGMP, guru akan semangat dalam pertemuan jika MGMP mampu mendatangkan para narsum dari dinas, LPMP, PT atau narsum internal yang pernah ikut pelatihan sebagai ‘*oleh-oleh*’ untuk *sharing* ilmu.

Dana tidak bisa dipungkiri menjadi salah satu kebutuhan terhadap keberlangsungan kegiatan. Diakui, biasanya alokasi dana habis digunakan untuk sewa tempat, honor narsum, konsumsi/snack dan sedikit ATK. Akan tetapi, semua ketua/pengurus MGMP sepakat bahwa kegiatan MGMP adalah lebih kepada kegiatan sosial dari guru, oleh guru dan untuk guru.

Dari diskusi dan keterisian kuesioner, MGMP memiliki pola pembiayaan kegiatan yang jelas. Mereka menyadari bahwa kegiatan lebih mengutamakan azas kekeluargaan. MGMP tidak selalu menanti bantuan baik dari pusat maupun dinas. Ada ataupun tanpa bantuan, banyak atau sedikit, kegiatan MGMP mapel SMP tetap berjalan, seperti yang dilakukan oleh MGMP mapel Prakarya. Salah satu upaya yang dilakukan oleh para pengurus anggota MGMP dalam pendanaan adalah melakukan iuran setiap pertemuan. Ada juga iuran bulanan untuk uang kas MGMP yang besarnya iuran bervariasi, sebisa mungkin disisihkan untuk uang kas. Rata-rata MGMP mapel SMP mengumpulkan iuran sebesar Rp. 10.000,-/pertemuan.

Ada MGMP mapel yang pernah mendapatkan bantuan pemerintah, baik dari pusat, dan dinas yang besarnya bervariasi. Seperti MGMP mapel bahasa Indonesia, saat ini telah mendapat bantuan dari pusat dan daerah sekitar Rp.150.000/pertemuan, alokasinya digunakan untuk sewa tempat sebesar Rp.75.000,- untuk ruang kecil dengan durasi waktu kurang lebih 5 jam dari pukul 08.00 – 13 .00 wib atau lebih.

Dalam FGD pun disinggung terkait bantuan. Timbul pertanyaan, jika wadah MGMP selalu mengharapkan dana bantuan apakah jaminan pengelolaan menjadi baik? Jika mau jujur, selama ini para guru juga telah mendapat beberapa tunjangan misalnya tunjangan profesi yang dananya dapat digunakan untuk meningkatkan kompetensi guru. Atau apakah memungkinkan Pemda atau organisasi profesi menghimbau

dana dari sertifikasi tersebut disishkan tidak hanya Rp.10.000,-/pertemuan bahkan lebih untuk MGMP, bukankah rata-rata sebulan dana profesi guru bisa mencapai tiga juta rupiah? Dari hasil diskusi kembali ditekankan dan menghimbau teman-teman para guru untuk juga memiliki tanggungjawab moral. Intinya, apa yang harus dilakukan agar MGMP bermanfaat bagi anggotanya, yang *ending*-nya untuk siswa.

Yang perlu digarisbawahi pergerakan atau atau kemajuan MGMP sangat bergantung kepada komitmen berorganisasi anggota. Komitmen itu sendiri amat ditentukan pula oleh kondusifitas pengelolaan, aktivitas, dan penilaian anggota terhadap kemanfaatan yang diperoleh. Anggota akan ikhlas mengeluarkan dana tertentu, apabila organisasi MGMP dirasakan manfaat dalam membentuk kompetensi dan profesionalismenya. Bagaimanapun mutu pendidikan peserta didik bukan hanya tanggungjawab pusat atau provinsi, melainkan kabupaten/kota melalui dinas pendidikan. Kunci sukses hasil pendidikan peserta didik di sekolah adalah guru.

Pola pembiayaan MGMP mapel SMP di Kab. Limapuluh Kota sangat jelas, sebagian besar dana yang berhasil dihimpun dimanfaatkan untuk komponen biaya berikut (i) honor nara sumber baik internal dari LPMP, PT, dan dinas maupun eksternal guru sendiri , (ii) transport nara sumber, (iii) insentif fasilitator internal, (iv) pengadaan sarana/media, (v) perawatan sarana/media, (vi) pengadaan bahan pembelajaran, (vii) sewa tempat pertemuan, dan (viii) konsumsi pertemuan.

Dalam menyusun perencanaan tahunan, MGMP dapat melibatkan kepala sekolah dan komite sekolah sehingga mereka melihat pentingnya pelaksanaan kegiatan MGMP dan mau membantu pendanaannya dengan menyisihkan sebagian dana BOS atau iuran dari komite untuk mendukung kegiatan MGMP (Silisabon, 2019). Hal ini dibuktikan oleh beberapa pengurus MGMP setempat, banyak sekolah sangat mendukung guru mengikuti kegiatan MGMP, bahkan sekolah menyokong dengan memberikan transport alokasi dari dana BOS kepada guru yang terlibat dalam pertemuan MGMP. Meski tidak semua anggota mendapatkan kemudahan untuk mengikuti kegiatan MGMP, kendala lebih dialami rekan guru sekolah swasta, karena terkait meninggalkan jam pelajaran.

Dukungan kepala sekolah sangat membantu

pengembangan kemampuan guru untuk terlibat MGMP, penelitian Nurlaeli (2018) menyebutkan pelibatan guru dalam MGMP membuat guru tidak merasa kesulitan dalam melaksanakan pembelajaran secara maksimal, salah satunya peran Kepala Sekolah selalu memfasilitasi dan memotivasi semua guru dalam mengikuti kegiatan MGMP baik ditingkat intern sekolah, wilayah, maupun tingkat kabupaten.

Kendala

Berbagai tantangan dan harapan demi kemajuan MGMP mapel tentu ada di tangan para guru. Harapan pengurus dan anggota MGMP mapel SMP agar organisasi profesi tetap eksis. MGMP Prakarya berharap ada motivasi dan ketegasan dari Disdik setempat agar mengizinkan semua guru mapel Prakarya mengikuti MGMP. Selama ini guru bukan basic Prakarya, misal dari basic IPA atau lainnya tidak diijinkan oleh kepala sekolah mengikuti MGMP Prakarya, alasannya sudah ikut MGMP mapel IPA

MGMP PJOK dan bahasa Inggris, memiliki harapan serupa bahwa selama ini pertemuan MGMP bersamaan dengan jam mengajar, perlu keluwesan durasi pertemuan artinya diperbolehkan lebih dari 3 jam, dan kepala sekolah memahami. Selain itu, dinas juga lebih membuka kesempatan guru ikut pelatihan tentang HOTS, karena banyak teman guru belum memahami bagaimana penyusunan soal HOTS.

MGMP Bahasa Indonesia menaruh harapan dan bagi MGMP mapel lainnya bahwa untuk meningkatkan kualitas guru hendaknya mendatangkan narsum yang kompetensinya sempurna/sangat baik agar dapat menyampaikan ke guru-guru lainnya.

MGMP IPA mengharapkan untuk mengeksplor kemampuan guru-guru IPA, dinas dapat membantu untuk pembuatan jurnal sebagai wadah penulisan ilmiah guru IPA, perlu mengadakan *workshop* terkait materi HOTS dengan narsum pusat. Dipastikan, hampir semua sekolah ikut, seperti kegiatan PKB. Pembentukan klaster tidak membuat MGMP efektif, dalam imbasnya akan terasa jika pertemuan tanpa fasilitator jadi tidak semangat.

Agar MGMP selaras dengan perkembangan jaman, MGMP IPS berharap ke depannya anggota MGMP harus lebih aktif lagi, ada regenerasi pengurus

yang baru dan muda yang dapat membawa ke arah yang lebih inovasi. MGMP juga sebaiknya dijadikan kegiatan terpusat di kabupaten atau dinas hal ini dikarenakan lokasi/jarak.

Bagi MGMP Matematika, jarak atau lokasi sekolah yang berjauhan satu dengan dengan tempat kegiatan awalnya menjadi kendala, mempengaruhi turun naiknya keaktifan guru yang hadir. Pernah melakukan solusi membagi 3 titik pertemuan atau 3 klaster, namun kurang efektif. Disepakati menyewa tempat yang posisinya di tengah-tengah, agar tidak memberatkan guru dari daerah satu dengan guru daerah lainnya.

MGMP bahasa Inggris, sebelumnya ada *imej* kegiatan MGMP selalu identik bila ada dana, baru ada program seperti program *blockgrand* PPK tuntas sampai selesai karena ada bantuan dana. Sebaliknya jika tidak ada akan '*mandek*'. Pengurus mencoba merangkul guru-guru dengan memberikan program dan kegiatan yang jelas, MGMP ingin membuat program dan capaian yang ingin dicapai apa? Kesulitan lain adalah bagi guru yang masih baru yang masih belum mengerti, bagaimana dampak MGMP ke siswa.

Dari segi kuantitas, MGMP IPS, seringkali berkumpul, namun dahulu anggota inginnya pulang buru-buru. Idealnya dimulainya lambat maka lambat pula pulangannya. Bukan karena malas melainkan ada batas waktu dan tanggungjawab yang diberikan sekolah masing-masing. Solusinya, mengirim surat melalui MKKS meminta dukungan kepala sekolah, agar memaklumi dan mendorong kegiatan MGMP dari sisi waktu, dan kendala itu teratasi. Berbagai permasalahan pembelajaran khususnya mata pelajaran IPS di sekolah dicarikan solusinya, harapannya kualitas proses pembelajaran dapat ditingkatkan.

Dana sempat menjadi kendala utama bagi MGMP PPKN, namun para anggota berinisiatif *merogoh* dari kocek dana pribadi atau mandiri iuran bulanan serta iuran semester Rp. 50.000,-. Guru menyadari dana itu digunakan untuk kepentingan bersama bukan untuk pengurus, misalnya konsumsi, sewa tempat, dan narsum, serta murni lebih kepada kegiatan sosial, kenduri, dengan kata lain dari kita untuk kita.

MGMP Prakarya lebih kepada kendala adanya berbeda aspek pembelajarannya tiap sekolah, yaitu mapel TIK dengan mapel Prakarya. Keterampilan dianggap mapel yang sama padahal tidak bisa dalam 1 tingkat diajar sama. Masalah

lainnya adalah pengurus MGMP bingung dengan basic dari guru mapel prakarya.

MGMP IPA, nyaris serupa dengan MGMP Matematika, banyaknya jumlah anggota yang ikut MGMP, dibentuk 3 klaster dengan harapan proses kegiatan akan lebih efektif, dimana setiap kelompok ada 30 orang guru. Namun sebaliknya, timbul kendala tidak ada fasilitator membuat anggota tidak semangat.

MGMP Seni budaya, kendalanya lebih ke teknis yaitu materi penyusunan soal HOTS yang masih kurang. Solusinya pengurus, mendatangkan narsum dari luar, atau dari internal teman-teman yang pengalaman. Kegiatan dilakukan dengan bekerja secara kelompok, diskusi, jika ada kesulitan di lapangan, dibahas bersama. Pada MGMP bahasa Indonesia; kendalanya hanya perlu regenerasi kepeguruan.

MGMP harus dimaknai sebagai sebuah proses yang terus hidup, tumbuh, dan berkembang sepanjang waktu. Melalui pemberdayaan secara terus-menerus dan berkelanjutan, MGMP diharapkan dapat berperan sebagai mediator dalam pengembangan dan peningkatan kompetensi guru, agen "penyemangat" dalam inovasi manajemen kelas dan sekolah, serta kolaborator terhadap unit terkait dan organisasi profesi.

Keberhasilan MGMP dalam memberdayakan diri sangat dipengaruhi oleh etos kerja pengurus, anggota, dan guru mata pelajaran dalam membangun semangat kebersamaan dan persaudaraan. MGMP mapel SMP di Kab. Limapuluh kota menyadari, meski dana menjadi problem serius untuk menjalankan programnya, namun dengan keterbukaan dan koordinasi bersama anggota, hal tersebut dapat diatasi melalui terobosan penggalan sumber dana dan mengajak teman-teman sejawat melakukan iuran yang peruntukannya dari guru, oleh guru dan untuk guru. MGMP mapel menyadari jika hanya mengandalkan dana *block-grant* apakah ke depannya MGMP masih punya "gigi" untuk berkiprah jika suatu saat tidak ada *blockgrand*?

MGMP mapel harus berupaya melakukan penajaman program yang riil dan praktis agar MGMP benar-benar mampu membantu guru dalam menguasai kompetensi sesuai standar pendidik, misalnya kehadiran narsum dan menawarkan program untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam

merencanakan, melaksanakan, dan membuat evaluasi program pembelajaran dalam rangka meningkatkan guru yang profesional, maka dengan sendirinya guru akan tertarik aktif dalam MGMP.

SIMPULAN DAN USULAN REKOMENDASI

Simpulan

Upaya yang dilakukan oleh pengurus MGMP mapel SMP di Kabupaten Limapuluh kota dapat dijadikan rekomendasi bagi penyelenggaraan MGMP serupa di daerah lain. Di tengah kendala dan keterbatasan senantiasa menjunjung azas kekeluargaan yang dalam kegiatannya selalu melakukan koordinasi. Segala permasalahan diputuskan bersama-sama dalam setiap pertemuan, kendala dana, materi serta keberadaan narsum. MGMP juga selalu melakukan koordinasi dengan dinas pendidikan dalam berbagai kegiatan. Guru sangat menyadari akan keberadaan MGMP sebagai forum diskusi untuk memecahkan permasalahan pembelajaran sesama rekan seprofesi. Guru juga mengaku merasakan manfaat MGMP sebagai saling tukar pengalaman dan umpan balik, dalam meningkatkan dan melaksanakan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan kinerja guru untuk proses pembelajaran yang lebih profesional.

Gambaran profil MGMP SMP adalah sebagian besar MGMP melakukan pertemuan 12 kali dalam satu tahun. Sebagian besar guru terlibat di masing-masing MGMP mapel, hal ini terlihat dari persentase keaktifan guru yang terlibat dalam setiap pertemuan MGMP rata-rata diatas 70 persen, yang tertinggi adalah keaktifan guru pada MGMP mapel IPS mencapai 82,6 persen. Kendala MGMP di manapun klasik seperti dana, jarak, waktu, keaktifan anggota, kemampuan pengurus, dan narsum. Oleh MGMP, sedapat mungkin tanpa bantuan MGMP harus tetap berjalan yang disiasi dengan mengumpulkan iuran yang jumlahnya bervariasi. Bahkan ada sekolah yang memberi *support* gurunya aktif dalam MGMP dengan memberikan dana transport bersumber BOS. Kendal jarak, lokasi yang berjauhan dan jumlah guru yang terlibat banyak, dengan membuat klaster tiap wilayah ternyata kurang efektif akhirnya diambil kesepakatan pertemuan di tengah-tengah.

Keaktifan anggota juga sangat dipengaruhi oleh adanya narsum yang baik. Kehadiran narsum selain menjadi daya tarik guru untuk hadir juga

dapat *sharing* terkait pembelajaran. Hampir semua MGMP mapel SMP mendatangkan narsum dalam setiap pertemuannya. Selain dari guru internal yang telah mengikuti pelatihan, juga dari PT, dinas kab./ provinsi, dan LPMP yang dapat memberikan pengembangan, materi dari penyusunan soal, PPK guru, peningkatan karir guru.

Usulan Rekomendasi

Agar MGMP tetap eksis, MGMP perlu lebih aktif berkordinasi dengan sesama pengurus MPMG mapel lain, dengan Dinas Pendidikan melakukan pelaporan, koordinasi, pembinaan dengan pengawas, sekolah dalam hal ini MGMP dapat melibatkan PT dalam melibatkan mahasiswa tingkat akhir untuk mengajar di kelas menggantikan guru yang mengikuti kegiatan MGMP sebagai salah satu Tri dharma PT, dengan komite sekolah memberikan laporan efektifitas pertemuan guru dalam kegiatan MGMP yang muaranya untuk siswa dalam meningkatkan pembelajaran.

Dinas harus lebih aktif melakukan pembenahan dan pembinaan MGMP agar tidak berjalan sendiri. Tanpa pelibatan dinas, jangan harap MGMP dapat menjalankan perannya. Dinas juga dapat menganggarkan atau memberikan pelatihan terkait metode pembelajaran, mengadakan nara sumber bagi kegiatan MGMP, serta pemberdayaan pengawas yang selama ini terkesan sekedar "stempel" hanya absen setelah itu pulang.

Praktik baik MGMP mapel di Kab. Limapuluh kota dapat dicontoh di wilayah lain agar MGMP benar-benar dapat dijadikan sarana menambah wawasan guru dalam proses pembelajaran, berbagi pengalaman dan ilmu baik terhadap proses pembelajaran maupun informasi tentang kebijakan yang diperlukan untuk meningkatkan profesionalisme guru dalam peningkatan mutu pendidikan.

PUSTAKA ACUAN

- Agung, Iskandar. 2017. Guru yang kompeten dan profesional: Orasi ilmiah profesor riset. Jakarta: Balitbang – Kemendikbud
- Anwar, Rosihan. 2011. Pengaruh Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Terhadap

- Peningkatan Profesionalisme dan Kinerja Mengajar Guru SMA Negeri Kota Tasikmalaya. *Jurnal Administrasi Pendidikan*. Universitas Pendidikan Indonesia: Volume 13 Nomor 1, 2011.
- Budiana, H.R., Sjaifirah, N.A. dan Bakti, I. 2015. Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dalam Pembelajaran Bagi Para Guru Smpn 2 Kawali Desa Citeureup Kabupaten Ciamis. *Dharmakarya Unpad: Jurnal Aplikasi Ipteks untuk Masyarakat* Vol. 4, No. 1, Mei 2015.
- Budiman, Haris. 2017. Peran Teknologi Informasi dan Komunikasi Dalam Pendidikan. *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, Volume 8, Mei 2017.
- Daryanto dan Tasrial. 2011. *Konsep Pembelajaran Kreatif*. Yogyakarta: Gavamedia
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. Standar Pengembangan Kelompok Kerja Guru (KKG) dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Direktorat Profesi Pendidik, Depdiknas RI 2008.
- Husaini, M. 2014. PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM BIDANG PENDIDIKAN (E-education). *Jurnal Mikrotik* Volume 2 No.1 Mei 2014
- Islahuddin. 2018. Peningkatan Kinerja Guru Melalui Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Bahasa Indonesia di SMPN 1 Labuhan Haji Tahun 2016/2017. *Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia* : Volume 1, Nomor 2, November 2018.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2014. Materi Pelatihan Implementasi Kurikulum 2013. Pusat Pengembangan Profesi Pendidik Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan, Kemedikbud, 2014.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2016. Panduan Pelatihan Instruktur Nasional Kurikulum Sekolah Dasar Tahun 2016. Jakarta: Dit Pendidikan Sekolah Dasar, Ditjen Dikdasmen, Kemendikbud.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2017. Sistem Informasi APK dan APM. PDSPK Kemendikbud.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2019. Neraca Pendidikan Daerah (NPD) Kabupaten Limapuluh Kota. Kemendikbud, Desember 2019.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2019. Capaian Hasil Ujian Nasional tingkat SMP Kab. Limapuluh Kota. Pusat Penilaian Pendidikan, Balitbang Kemendikbud.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2019. Akreditasi SMP Kab.Limapuluh Kota. Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, Kemendikbud.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2020. Data Pokok Pendidikan Kab. Limapuluh Kota. Direktorat Jenderal PAUD, dan Dikdamen, Kemendikbud.
- Kepala Dinas Pendidikan Kab.50 Kota. 2018. Wawancara dan Diskusi Optimalisasi Peran MGMP dalam Meningkatkan Kualitas Mengajar. Tanggal 13 September 2018; SMPN 3 Kab. Limapuluh Kota.
- Lie, Anita. 2020. Di Era Merdeka Belajar, 6 Hal Ini Perkuat Kelompok Kerja dan Musyawarah Guru. *Kompas.com*, Tanggal 20-02-2020.
- Moleong, Lexy, J. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nurlaeli,Yuli. Saryono, Oyon. 2018. Efektivitas Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Dalam Meningkatkan Kinerja Mengajar Guru Bahasa Inggris. *Indonesian Journal of Education Management and Administration Review*. December, 2018: Volume 2 Number 2.
- Nurdianti. 2013. Pengaruh Manajemen MGMP Terhadap Kompetensi Profesional dan Kompetensi Pedagogik Guru serta Implikasinya kinerjanya pada Guru Mapel Ekonomi di SMA Negeri Se-Bandung. Universitas Pendidikan Indonesia.
- Paraba, Hadirja. 2000. *Wawasan Tugas Tenaga Guru dan Pembina PAI*. Jakarta: Friska Agung Insani. h. 9.
- Republik Indonesia. 2010. Peraturan Menteri Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala BKN No.03/V/PB/2010 Tahun 2010 dan Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Petunjuk pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.

- Republika.co.id. 2018. Ini Faktor MGMP tidak Berjalan Efektif. [https://republika.co.id/berita/ pendidikan/education](https://republika.co.id/berita/pendidikan/education). Diakses tanggal 7 Nov 2019.
- Republik Indonesia. 2005. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
- Sagala, Syaiful. 2009. Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan: Pemberdayaan guru, tenaga kependidikan, dan masyarakat dalam manajemen sekolah. Bandung: Alfabeta
- Sanjaya, Wina. 2008. Perencanaan dan desain sistem pembelajaran. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Setiawan, Wawan. 2017. Era Digital dan Tantangannya. Universitas Pendidikan Indonesia:
- Seminar Nasional Pendidikan 2017
- Silisabon, Simon. 2019. Evaluasi Peran MGMP di Daerah Terpencil Dalam Meningkatkan Kualitas Guru Melalui Penyusunan Soal USBN (Studi Kasus Di Kabupaten Flores Timur (Flotim) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT)). *Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan* Volume 12, Nomor 1, Agustus 2019.
- Sudibyo, Lies. 2011 Peranan dan Dampak Teknologi Informasi dalam Dunia Pendidikan di Indonesia. Sukoharjo: 2011.
- Sumardi, R. 2009. Problem Profesionalisme Guru dan Mutu Pendidikan. Diambil dari web <http://robertsumardi.wordpress.com/2012/02/25/problema-profesionalisme-guru-dan-mutupendidikan-2>, Diakses tanggal 7 Januari 2019.
- Sutjipto. 2016. Pentingnya Pelatihan Kurikulum 2013 Bagi Guru. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, Balitbang Kemeendikbud*, Vol. 1, Nomor 2, Agustus 2016
- Uslimah, Ani. 2006. Evaluasi Program MGMP Biologi SMA. *Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan*. Nomor 1, Tahun VIII. 2006.
- Wahyusungsih, Sri. 2020. Dari Diskusi Persiapan Asesmen Kompetensi Minimal (AKM) Menuju Sekolah Berkualitas. <http://ditpsd.kemdikbud.go.id/artikel/detail/persiapkan-asesmen-kompetensi-minimum-akm-menuju-sekolah-berkualitas>. Tanggal 10 Oktober 2020
- Werkanis AS & Hamadi, Marlius. 2005. Strategi Mengajar dalam Pelaksanaan Kurikulum Berbasis Kompetensi. Riau: Sutra Benta Perkasa : 2005, hlm. 39.
- Winingsih, L. H., Agung, I., & Sulistiono, A.A. 2019. The Influence of Government Policy, Principle Leadership, and Participation of Parents on Strengthening Teacher Organizations (KKG/MGMP) and Development of Problem Solving in Students: Indonesia Case, *International Journal Education and Practice*, v7n4, p479-493.
- Wuryanto, Agus. 2011. Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan KKG dan MGMP. <https://aguswuryanto.wordpress.com/2011/01/01/prosedur-operasional-standar-penyelenggaraan-kkg-dan-mgmp>. Diakses 6 Maret 2020.